

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024**



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala rasa hormat dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tingkat kinerja dalam hal pencapaian visi, misi serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao. Laporan ini sekaligus merupakan salah satu bentuk evaluasi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersih dan merupakan prasyarat bagi aparat pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang diprogramkan pada tahun 2024, kami sadari bahwa dalam pelaksanaannya belum maksimal. Walaupun demikian, peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik, berkualitas dan transparan serta partisipatif tetap menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada.

Kami menyadari akan keterbatasan kemampuan kami, sehingga penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami butuhkan demi penyempurnaan di tahun yang akan datang, namun kami selalu berusaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Ba'a, 20 Januari 2025



Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao

Marthen Muskanan, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19700217 200312 1 006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2024.

Rincian capaian indikator kinerja sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Politik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini		Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan				100,00	Sangat Tinggi
	Terwujudnya pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	Cakupan Pembinaan Ideologi, wawasan Kebangsaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Partai Politik yang diverifikasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Cakupan Pembinaan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN					100	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian yaitu:

- 1) Capaian kinerja Tujuan **Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*);
- 2) Capaian kinerja sasaran 1 **Cakupan Pembinaan Ideologi, wawasan Kebangsaan** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*); dan
- 3) Capaian kinerja sasaran 2 **Persentase Ormas/LSM yang dibina** sebesar 100 % (*Sangat Tinggi*).
- 4) Capaian kinerja sasaran 3 **Persentase Partai Politik yang diverifikasi** sebesar 100 % (*Sangat Tinggi*).
- 5) Capaian kinerja sasaran 4 **Cakupan Pembinaan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi** sebesar 100 % (*Sangat Tinggi*).

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2024 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima” melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tercapai dan berhasil namun masih ada kendala antara lain :

1. Masih rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam rangka penataan kelembagaan, penyelenggaraan pembinaan Politik, Kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini;
2. Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan dibidang politik;
4. Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah sosial dan penanganan nya;
5. Masih kurang Rasa Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat; dan
6. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM/Aparatur dalam penguasaan Iptek.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam rangka penataan kelembagaan, penyelenggaraan Pembinaan Partai Politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini;
2. Peningkatan penguatan dan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
3. Peningkatan dan sosialisasi secara terus-menerus agar masyarakat dapat memahami tentang ketentuan/ peraturan dibidang politik;
4. Peningkatan dan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat;
5. Peningkatan pengawasan terhadap orang Asing; dan
6. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam menguasai IPTEK melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Anggaran yang mendukung Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran sebesar **Rp. 25.529.255.781,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 25.387.639.722,-** atau **99,45 %**.

Pencapaian kinerja tahun 2024 senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya

Ba'a, 20 Januari 2025



Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao

Marthen Muskanan, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19700217 200312 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
1. Tugas Pokok	3
2. Fungsi	3
3. Struktur Organisasi	3
4. Sumber Daya Manusia	4
5. Sarana Prasarana	6
6. Peralatan Badan dan Aset Lainnya	7
D. Dasar Hukum	9
E. Sistematika Pelaporan	10
BAB II RENSTRA DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Renstra Tahun 2019-2024	13
1. Pernyataan Visi dan Misi	14
2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis	16
3. Program dan Kegiatan	17
B. Indikator Kinerja Utama	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	22
B. Capaian Kinerja	25
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
D. Kinerja Keuangan	49
1. Realisasi Keuangan	50
2. Efisiensi dan efektifitas Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	57
Lampiran-Lampiran	58
1. LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP	
2. SK TIM PENYUSUN LKIP BAKESBANGPOL	
3. SOP	
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	
5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	
6. RENCANA AKSI TAHUN 2024	
7. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nominatif Pegawai.....	5
Tabel 1.2 Daftar Kendaraan Bermotor	6
Tabel 1.3 Keadaan Peralatan.....	7
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja	21
Tabel 3.1 Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan	25
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran	27
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Tujuan.....	29
Tabel 3.5 Tingkat efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan	34
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	36
Tabel 3.7 Data Ormas yang dibina	38
Tabel 3.8 Daftar Partai Politik yang di Verifikasi.....	40
Tabel 3.9 Data Orang Asing	44
Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi capaian kinerja sasaran	49
Tabel 3.11 Realisasi Keuangan TA. 2024.....	51
Tabel 3.12 Efisiensi dan Efektifitas anggaran.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Bakesbangpol.....	5
Gambar 3.1 Tingkat capaian Kinerja Tujuan.....	26
Gambar 3.2 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	27
Gambar 3.3 Tren Presentase Layanan pembinaan politik	31
Gambar 3.4 Tren Cakupan Pembinaan Ideologi Pancasila	31
Gambar 3.5 Tren Presentase Ormas/LSM yang dibina	37
Gambar 3.6 Tren Presentase Partai Politik yang di verifikasi	39
Gambar 3.7 Tren Cakupan Pembinaan Seni,Budaya	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk implementasikan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta *Nawa Cita* Pemerintah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao pada masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah untuk :

- a. Menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao selama Tahun 2024 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Rote Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut :

Aspek Akuntabilitas Kinerja yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama tahun 2024.

Aspek Manajemen Kinerja yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Aspek penerapan SAKIP yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Tugas Pokok.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Fungsi.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi :

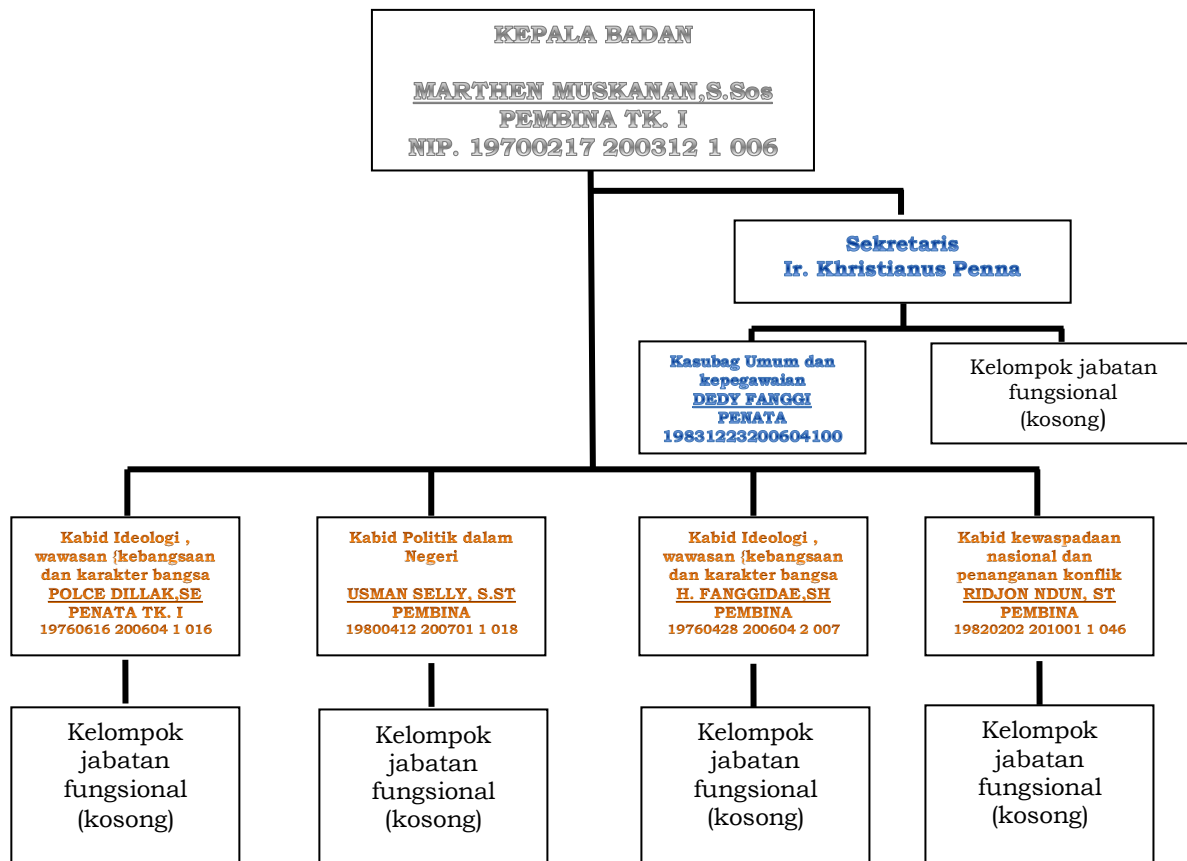
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Struktur Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao, Susunan Organisasi Bakesbangpol terdiri dari : Kepala Badan (terisi); Sekretaris (terisi); Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (terisi); Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (terisi); Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas (terisi); Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa (terisi); dan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (terisi), Kelompok Jabatan Fungsional (lowong).

Bagan Struktur Organisasi 1.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rote Ndao



4. Sumber Daya Manusia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 16 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Berdasarkan pendidikan

- SI : 9 (Sembilan) orang / (57,25 %)
- Diploma : 1 (satu) orang / (6,25 %)
- SLTA : 6 (enam) orang / (37,50 %)
- *Jumlah* : 16 (lima belas) orang

2) Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-Laki : 13 (tiga belas) orang / (81,25 %)
- Perempuan : 3 (tiga) orang / (18,75 %)
- *Jumlah* : 16 (enam belas) orang

3) Berdasarkan Agama

- Kristen Protestan : 13 (tiga belas) orang / (81,25%)
- Khatolik : 1 (satu) orang / (6,25 %)
- Islam : 2 (dua) orang / (12,5 %)
- *Jumlah* : 16 (enam belas) orang

4) Berdasarkan Golongan

- Golongan IV : 5 (lima) orang / (31,25 %)
- Golongan III : 5 (lima) orang / (31,25 %)
- Golongan II : 6 (enam) orang / (37,50 %)
- *Jumlah* : 16 (enam belas) orang

5) Berdasarkan Eselonering

- Eselon II : 1 (satu) orang / (6,25 %)
- Eselon III : 5 (lima) orang / 31,25 %)
- Eselon IV : 1 (satu) orang / (6,25 %)
- Non Eselon : 9 (delapan) orang / (57,25 %)
- *Jumlah* : 16 (enam belas) orang

Tabel 1.1
Daftar Nominatif Pegawai Badan Kebangsaan dan Politik
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Ket
1.	Marthen Muskanan, S.Sos/ 19700217 200312 1 006	Pembina Tk. I / IV-b	Kepala Badan	S1
2.	Ir. Khristianus Penna / 19661221 199603 1 006	Pembina Tk. I / IV-b	Sekretaris	S1
3.	Hanny A. Fanggidae, SH/ 19760428 200604 2 007	Pembina / IV a	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama & Ormas	S1
4.	Usman Selly, S.ST / 19800412 200701 1 018	Pembina / IV a	Kabid Politik Dalam Negeri	S1
5.	Ridjon Ndun, ST 19820202 201001 1 046	Pembina / IV a	Kabid Wasnas Dan Penanganan Konflik	S1
6.	Polce Dillak, SE/ 19760616 200604 1 016	Penata Tk.I / III-d	Kabid Ideologi, Wasbang & Karbang	S1
7.	Dedy Fanggi, SH 19831223 200604 1 006	Penata / III c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
8.	Maria M. Jemumut, A.Md/ 19780405 200904 2 006	Penata Muda Tk.I/III-b	Pelaksana	D3
9.	Hendrik Pello, SH/ 19760717 200604 2 002	Penata Muda TK.I/ III-b	Pelaksana	S1
10.	Choly Ibrahim TD, S.Ikom/ 19790405 200501 1 009	Penata Muda/ III.a	Pelaksana	SI
11.	Yulius M Sine/ 19740724 200501 1 008	Penata Muda/ III.a	Pelaksana	SLTA
12.	Inge Fernandez / 19820822 200701 2 004	Pengatur TK I/ II d	Pelaksana	SLTA

13.	Alvred H. Tulle / 19780310 200701 1 014	Pengatur TK I/ II d	Pelaksana	SLTA
14.	Burhanudin Mustafa / 19750108 201212 1 003	Pengatur / II c	Pelaksana	SLTA
15.	Simson M Hanas/ 19720506 200501 1 009	Pengatur / II c	Pelaksana	SLTA
16.	Ridwan Riwu/ 19820705 201212 1 010	Pengatur Muda / II a	Pelaksana	SLTA

5. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut : Kendaraan dinas operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao terdiri dari kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 unit dan roda 4 sebanyak 1 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Kendaraan Bermotor

No	Merk/Tipe	No. Polisi	Tahun Pembelian	Jumlah	Ket
1.	Sepeda Motor/ Honda Supra Fit NF 100SLD	DH 5001 YU	2006	1 unit	Baik
2.	Sepeda Motor/ Honda Revo NPLI820MT	DH 5690 YU	2014	1 unit	Baik
3.	Sepeda Motor/ Yamaha YUPITER-ZCW I FI	DH 5902 VB	2018	1 unit	Baik
4.	Sepeda Motor/ Honda Revo Fit Warna Hitam	DH 5692 YU	2019	1 unit	Baik
5.	Sepeda Motor /Honda Beat	DH 3001 VB	2019	1 unit	Baik
6.	Mobil / Avanza Veloz 1,5 M/T	DH 205 YU	2014	1 Unit	Baik

Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu 1 unit Toyota Avanza 1300 Nomor Polisi DH 205 VB untuk kendaraan operasional kepala Badan yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) unit Honda (Tahun Pembelian 2019) Nomor Polisi DH 3001 VB untuk kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Ridwan Riwu (Baik);
 - b) 1 (satu) unit Honda Supra Fit NF (Tahun Pembelian 2006) Nomor Polisi DH 5001 YU untuk kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Ridjon Ndun, ST (Rusak);

- c) 1 (satu) unit Honda Revo (Tahun Pembelian 2014) Nomor Polisi DH 5690 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Ridwan Riwu (Baik);
- d) 1 (satu) unit Sepda Motor Yamaha Jupiter (Tahun Pembelian 2018) Nomor Polisi DH 5902 VB untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Simson Hanas (Rusak);
- e) 1 (satu) unit Sepda Motor Revo Fit (Tahun Pembelian 2019) Nomor Polisi DH 5902 VB untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao (Baik).

6. Peralatan Badan dan Aset lainnya.

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan Badan dan aset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

Tabel 1.3
Keadaan Peralatan Badan dan Aset Lainnya

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
1	Kunci Pas 1 set	Spana	1 set	Tidak ada
2	Rak kayu		1 unit	Ada/Baik
3	Rak Kayu Jati	Kayu Jati ex Lokal	1 unit	Ada/ Kurang baik
4	Rak Kayu	-	1 unit	Ada /Baik
5	Brand Kas	-	1 unit	Ada/Baik
6	White Board	-	1 unit	Ada/Baik
7	Lemari Kayu 3 Pintu	-	1 unit	Ada/kurang Baik
8	Lemari Kayu 2 Pintu	-	1 unit	Ada/ Baik
9	Lemari Kayu 2 Pintu	-	1 unit	Ada/ Baik
10	Meja Kayu Rotan/½ Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/kurang Baik
11	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/Kurang baik
12	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/Kurang Baik
13	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/ Kurang Baik
14	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/ Baik
15	Meja Kerja	½ Biro	1 Unit	Ada/Baik

16	Meja Kerja	Kayu Jati ex Lokal 1/2 Biro	1 Unit	Ada/Baik
17	Meja Kerja	Kayu Jati	1 Unit	Ada/Baik
18	Sofa	Spon	1 Set	Ada /Kurang baik
19	Kursi Kerja	Kayu	1 Set	Ada/ baik
20	Kursi Kerja	Kayu Jati Jepara	1 set	Ada/ baik
21	Gorden Uk Tinggi 125 Cm X lebar 75 cm	Kain dan Tiang Gorden	1 set	Ada/baik
22	AC 1 Unit	Samsung 1 PC	1 Unit	Ada/baik
23	AC 1 Unit	Sharp 19UCY	1 Unit	Ada/baik
24	Tandon air/Tangki Fiber air 1100 Liter		1 Unit	Ada/baik
25	Laptop	Sony Valo/ Windows 8/ Lenovo	1 Unit	Ada/baik
26	Laptop	Processor Intel Inside ram 8/ Lenovo	1 Unit	Ada/baik
27	Laptop	Windows 10 ACER Processor Intel Core 13	1 Unit	Ada/baik
28	Laptop	Lenovo	1 Unit	Ada/baik
29	Computer PC	Alcatros / Processor	1 Unit	Ada /rusak
30	Printer	Brother/ MFC1625 DW	1 Unit	Ada/rusak
31	Printer	Canon Pxima MP 287	1 Unit	Ada/baik
32	Printer	Canon Pixma MX 497	1 Unit	Ada/rusak
33	Printer	Canon PDMA Ip 2770	1 Unit	Ada/rusak
34	Selang penyemprot air	Polyesther	1 Set	Ada/ Baik
35	Masker Oksigen	Sarangan	1 Unit	Ada /Kurang Baik
36	Kamera + Attachi Ment	Sony/ W 830	1 set	Ada /rusak
37	Proyektor+ Attachiment	BENQM 5506P	1 unit	Ada /baik
38	Microphone/WirelesMic	Toa	1 Unit	Ada /Kurang Baik
39	Handycame	SONY CX 405	1 Unit	Ada/rusak
40	Mantel	Parasut	2 unit	Ada/ 1 unit rusak
41	Teropong	Binocular	1 Unit	Ada/Baik
42	Filling Cabinet	Brother	1 Bh	Ada/Baik
43	Kursi Plastik	Napolly	46 Bh	Ada/Baik
44	Kursi Tamu 4 set	Stainlles	2 Bh	Ada/Baik
45	AC	Panasonic	1 Bh	Ada/Baik
46	Gorden		40 L	Ada/Baik
47	Besi Gorden		81 M	Ada/Baik
48	Printer	Canon Pixma	3 Unit	Ada/Rusak

Sumber Data :Bakesbangpol Kab. Rote Ndao Tahun 2024

1.3.2. Bangunan Gedung/Badan

Adapun bangunan gedung Badan yang tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yaitu :

1. Bangunan Gedung Badan Permanen 1 unit
2. Bangunan Gudang tertutup permanen 1 unit
3. Bangunan Instalasi lain lain 1 Unit
4. Bangunan Pos jaga permanen 2 unit

1.3.3. Tanah

Aset tanah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Tanah Hibah dari masyarakat pada tahun 2007 terdiri dari :

1. Tanah Bangunan pos jaga seluas 150 m² dengan harga Rp. 1.500.000,-
2. Tanah Bangunan pos jaga seluas 80 m² dengan harga Rp. 800.000,-

D. Dasar Hukum.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
- f. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

E. Sistematika Pelaporan.

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

A. Latar Belakang.

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP

B. Maksud Dan Tujuan.

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.

C. Gambaran Umum.

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

D. Dasar Hukum.

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.

E. Sistematika Laporan.

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

C. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TA.2024

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Kerangka PENGUKURAN KINERJA

Menyajikan metode dan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan perbandingan target dan realisasi, perbandingan realisasi tahun sebelumnya dan tahunakhir RENSTRA.

B. CAPAIAN KINERJA

Menyajikan ringkasan capaian kinerja per program kegiatan Tahun Anggaran 2024.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Menyajikan hasil evaluasi dan capaian kinerja per program kegiatan

D. KINERJA KEUANGAN

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2024 beserta rincian belanja per prorgram

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari LKIP.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi :

a. Visi.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: *“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan”*.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

• **BERTUMBUH :**

Maju : meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Mandiri : masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

• **MAKMUR / SEJAHTERA :**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat;
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat;
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya;

- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.
- **TAAT :**
 - Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
 - Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.
- **BERSAHABAT :**
 - Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
 - Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”*, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah.

Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah : “Meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik”.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao yakni : “*Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Diri*”.

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao antara lain :

- a. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu dan pilukada);
- b. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa;
- c. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat; dan
- d. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

3. Program dan Kegiatan.

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao, maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini meliputi :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi umum perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
 - 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah.
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial, terbagi dalam dua sub kegiatan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah;
- 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah.

B. Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Adapun IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

Sasaran	Indikator		Formula Pengukuran	
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Politik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini		Presentase Layanan pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik yang direncanakan}}$	x 100
Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini	1	Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan yang direncanakan}}$	x 100
	2	Persentase Ormas/LSM yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Ormas/ LSM yang dibina}}{\text{Total Ormas/LSM}}$	x 100
	3	Persentase Partai Politik yang diverifikasi	$\frac{\text{Jumlah Partai Politik yang di Verifikasi}}{\text{Jumlah seluruh Partai Politik}}$	x 100
	4	Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Seni Budaya ,Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi yang direncanakan}}$	x 100

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/ tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program/kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan kegiatan yang terarah.

Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD TA. 2024, Strategi dan Prioritas APBD TA. 2024 dan DPA TA. 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas kinerja pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini		Persentase layanan pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	%	100
		Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini	Cakupan Pembinaan Ideologi wawasan kebangsaan	%	100
			Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	100
			Persentase Partai Politik Yang Diverifikasi	%	100
			Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	%	100
No	Program		Anggaran	Sumber Dana	
1.	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		Rp. 761.270.000	DAU	
2.	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan		Rp. 22.587.226.681	DAU	
3.	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Rp. 13.270.000	DAU	
4.	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		Rp. 25.220.000	DAU	
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Rp. 341.810.000	DAU	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 1.500.251.100	DAU	
	JUMLAH		Rp. 25.529.255.781	DAU	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja	≥	Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui target
Realisasi Kinerja	<	Target Kinerja	:	Belum mencapai target
Realisasi Kinerja Tahun	>	Realisasi Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja Tahun	<	Realisasi Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar >0% maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien,

sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian kinerja Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja tujuan

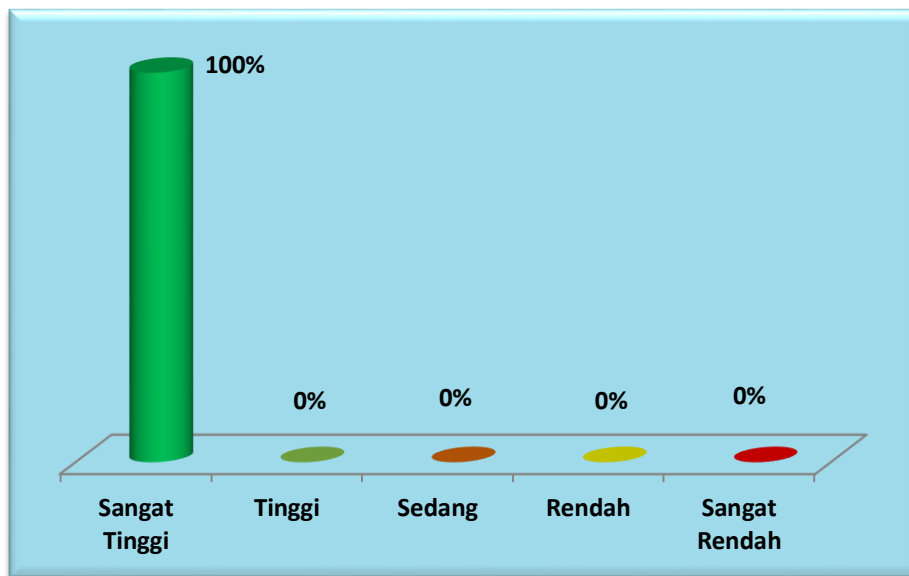
Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja tujuan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Politik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini	Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	Capaian Kinerja Tujuan				100,00	Sangat Tinggi
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN					100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas , maka dijelaskan bahwa terdapat satu tujuan dengan satu indikator kinerja tujuan dengan capaian indikator tujuan sebesar **100 %** kategori **sangat tinggi**.

Gambar 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao TA. 2024



Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa :

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 1 (satu) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0 %;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

2. Capaian indikator kinerja sasaran

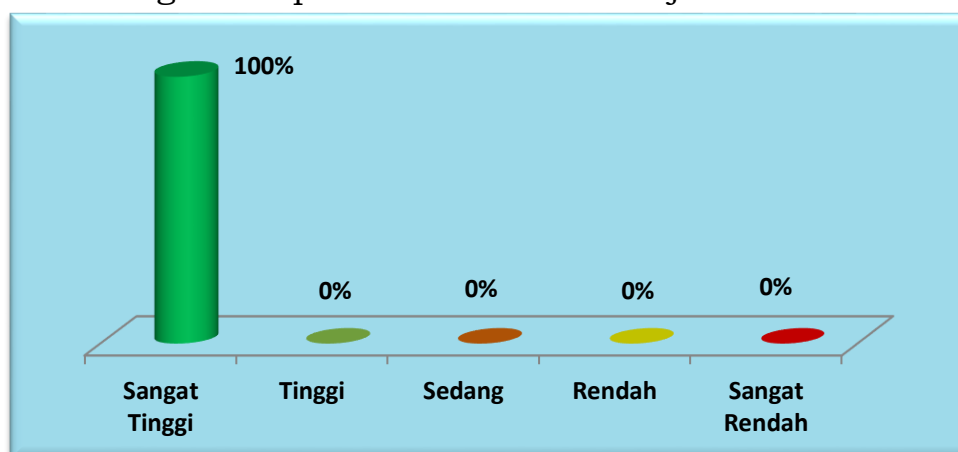
Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Terwujudnya pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	Cakupan Pembinaan Ideologi, wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Partai Politik yang diverifikasi	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Cakupan Pembinaan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Sasaran					100	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					100	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **100 %** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini**, sebesar 100 % (Sangat Tinggi).

Gambar 3.2
Tingkat Capaian Indikator Kinerja TA. 2024



Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao TA. 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 4 (empat) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0 %;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja tujuan sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

TUJUAN
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Politik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini

Pembinaan Politik Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini merupakan upaya untuk meningkatkan Pendidikan Politik, Pemberdayaan Ormas dan Partai Politik, peningkatan peran fasilitasi dan koordinasi dalam bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, Memantapkan Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Pembauran Bangsa, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial budaya, dan hukum. Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan tersebut maka tujuan yang harus dicapai adalah memperkokoh kesatuan dan kesatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis yang berkedaulatan rakyat.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja tujuan
Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2019	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						100,00	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja Tujuan **Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Persentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini

Indikator Persentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini adalah capaian atas jumlah kegiatan Kesatuan Bangsa dan politik yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan Kesatuan Bangsa dan politik yang direncanakan.

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah berjumlah 9 (Sembilan) Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Hari Lahir Pancasila (Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan);
2. Kegiatan Penyelenggaraan Paskibraka dan HUT RI (Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan);
3. Kegiatan Desk Pilkada (Bidang Politik Dalam Negeri);
4. Kegiatan Verifikasi Partai Politik dan Hibah KPU serta Bawaslu (Bidang Politik Dalam Negeri);
5. Kegiatan Pembinaan Ormas (Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat);
6. Kegiatan Forum Komunikasi Urusan Beragama (Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat);

7. Kegiatan P4GN (Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat);
8. Kegiatan Monitoring Orang Asing (Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik)
9. Kegiatan Rapat Forkopimda (Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik)

Dari 9 (Sembilan) kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024, semua kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa persentase tahun 2024 adalah 100%.

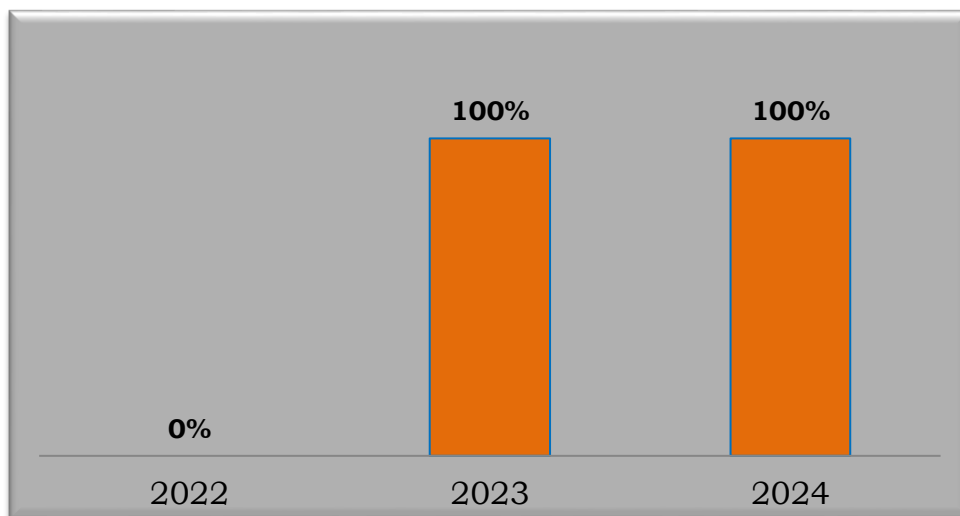
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja 'Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 100 %, maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja 100%.

Gambar 3.3
Tren Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini



Sumber: Olahan Data Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini 2024

Analisis Tren beberapa tahun terakhir

Tren Realisasi Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup positif.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi Indikator Kinerja Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%. sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja presentase Layanan pembinaan politik.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** Tahun Anggaran 2024 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT yang telah memberikan kontribusi positif bagi terciptanya situasi kondusif dalam bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
2. Adanya dukungan dari OPD, instansi teknis, FKUB dalam rangka bersinergi untuk meningkatkan kondisi kepekaan, kesiap-siagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya ancaman dan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat dan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan aparat kemanan dan forum-forum FKUB instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik sosial, terorisme dan radikalisme;
4. Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi kerja sama dan konsolidasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat, pencegahan dan penanggulan narkoba serta pengamanan konflik sosial di Kabupaten Rote Ndao; dan
5. Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sector terkait dengan pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan, pembinaan ketahanan budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta koordinasi pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan public dan politik;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini yang berbasis teknologi informasi;
4. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi forum-forum dibidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Belum adanya peraturan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Terbatasnya data dan informasi serta perencanaan program dan kegiatan yang belum optimal.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor terkait dengan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, pembinaan ketahanan budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta koordinasi pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan politik;
- 2) Peningkatan Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini yang berbasis teknologi informasi;
- 4) Peningkatan pembinaan dan sosialisasi forum-forum dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 5) Tersedianya peraturan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Tersedianya data dan informasi serta peningkatan perencanaan program dan kegiatan.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dan Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 25.529.255.781,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 25.387.639.722,- (dua puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 99,45 %.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 5

Tingkat efisiensi capaian kinerja tujuan Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini

Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Tujuan Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	99,45	0,55	Efisien	1,01	Efektif

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program capaian kinerja tujuan Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,55 % atau di kategorikan efisien, selain itu rasio capaian kinerja tujuan terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,01 sehingga dikategorikan efektif.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

SASARAN

Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini

Pembinaan Politik Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini merupakan upaya untuk meningkatkan Pendidikan Politik, Pemberdayaan Ormas dan Partai Politik, peningkatan peran fasilitasi dan koordinasi dalam bidang ketahanan seni budaya , agama, kemasyarakatan dan ekonomi, Sebagai bentuk penjabaran dari sasaran tersebut maka tujuan yang harus dicapai adalah memperkuat kesatuan dan kesatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis yang berkedulatan rakyat. Tujuan sasaran ini memiliki peran penting yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan Negara, khususnya upaya memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam memperkuat NKRI pada aras nasional dan daerah melalui:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi;
2. Peningkatan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Peningkatan komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat;
4. Peningkatan kesadaran warga Negara dalam partisipasi politik;
5. Peningkatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial; dan
6. Peningkatan tatanan budaya dan ketahanan ekonomi serta penguatan integrasi sosial.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi tahun 2024 terhadap realisasi tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Cakupan Pembinaan Ideologi Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	66,66	100	100	100	100	150	100
3.	Persentase Partai Politik yang diverifikasi	%	90	100	100	100	100	111	100
4.	Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						100	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini** terdapat 4 Indikator. Dari tabel diatas dapat diuraikan capaian indikator-indikator kinerja sasaran dimaksud sebagai berikut :

1) Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan.

Indikator Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan adalah Capaian atas Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi, wawasan kebangsaan yang dilaksanakan dibandingkan dengan Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi, wawasan kebangsaan yang direncanakan. Dalam rangka membangun karakter bangsa dengan melaksanakan revolusi mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, sejahtera berdasarkan Pancasila. Pada indikator ini terdapat dua kegiatan yang terkait dengan peningkatan ideologi wawasan kebangsaan dan penerapan empat pilar kebangsaan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu :

1. Kegiatan Upacara Hari Lahir Pancasila;
2. Kegiatan Penyelenggaran Paskibraka pada Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan bahwa capaian indikator Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 100%.

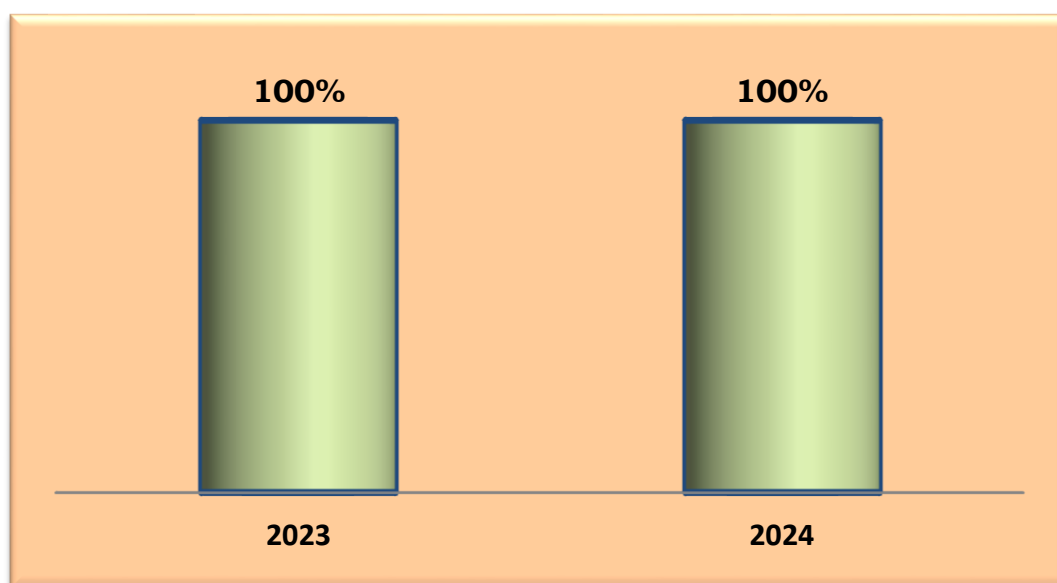
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 indikator Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja 100%.

Gambar 3.5
Tren Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan Tahun 2023-2024



Sumber: Olahan Data Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, 2024

Analisis Perbandingan Tren 2 (dua) Tahun terakhir

Tren Realisasi Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang positif yakni pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup positif.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Akhir Renstra

Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai 100%.

2) Persentase Ormas/ LSM yang dibina.

Indikator Persentase Ormas/LSM yang dibina adalah Capaian atas Jumlah Ormas/LSM yang dibina dibandingkan dengan jumlah ormas/LSM di Kabupaten Rote Ndao.

Dari Total Ormas/LSM yang sudah mendapat Surat Keterangan Terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao. Pada Tahun 2024 ditargetkan sejumlah 15 (lima belas) Ormas/LSM dengan persentase 100% dan Realisasi 100 % sebagai berikut :

Tabel 3.7
Data Ormas yang dibina Tahun 2024

No	Ormas	Terdaftar	Yang dibina
1.	Federasi Serikat Buruh Dekrasi Seluruh Indonesia;	√	√
2.	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia;	√	√
3.	Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional;	√	√
4.	Forum Peduli Nusak Lole;	√	√
5.	Gerakan Mahasiswa Kristen Ba'a;	√	√
6.	Strategi Pegkajian Edukasi Alternatif Edukasi;	√	√
7.	Yayasan Kasih Abadi Maluku;	√	√
8.	Ormas pijar nusa bangsa	√	√
9.	Yayasan Seribu cita bangsa	√	√
10.	Yayasan Garamin	√	√
11.	Yayasan uma ina	√	√
12.	Bela Diri Kera Sakti.	√	√
13.	Organisasi Perasatuan Guru Republik Indonesia;	√	√
14.	Badan Monitoring dan Evaluasi Flobamora NTT;	√	√
15.	Yayasan Komunitas Kritis Indonesia;	√	√

Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2024

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata cara Pendaftaran Ormas, sehingga persentase LSM/ormas yang dibina pada Tahun 2024 adalah 100 %.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

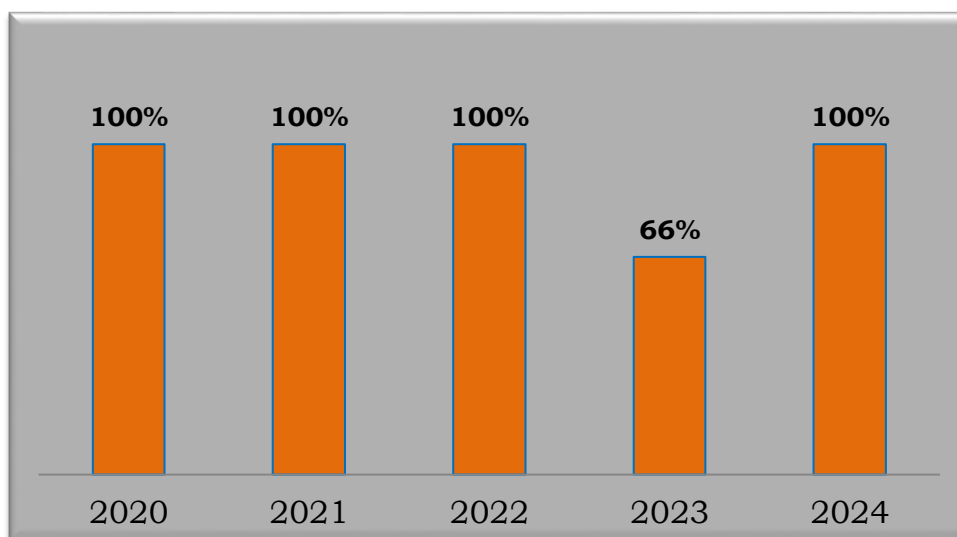
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Ormas/LSM yang dibina mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 Persentase Ormas/LSM yang dibina ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Persentase Ormas/LSM yang dibina tahun 2024 sebesar 100 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 66,66 %, menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 33,34 % dan capaian kinerja sebesar 100 % dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.6

Tren Persentase Ormas/LSM yang dibina Tahun 2020 – 2024



Sumber: Olahan Data Ormas, 2024

Analisis Perbandingan Tren 5 (lima) Tahun terakhir

Tren realisasi indikator Persentase Ormas/LSM yang dibina selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni periode tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yang sama, pada tahun 2023 terjadi penurunan, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Persentase Ormas/LSM yang dibina pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja presentase Ormas/LSM yang dibina.

3) Presentasi Partai Politik yang di verifikasi.

Indikator Persentase Partai Politik yang di verifikasi adalah Jumlah Partai Politik Yang di Verifikasi dibandingkan Jumlah Partai Politik. Partai Politik yang di verifikasi pada Tahun 2024 sebanyak 11 Partai Politik dari 11 Partai Politik atau sebesar 100 %:

Tabel 3.8

Daftar partai yang di verifikasi tahun 2024

No	Jumlah Partai Politik	Partai Politik yang diverifikasi
1.	PKB	PKB
2.	Gerindra	Gerindra
3.	PDIP	PDIP
4.	Golkar	Golkar
5.	Nasdem	Nasdem
6.	Gelora	Gelora
7.	Hanura	Hanura
8.	PAN	PAN
9.	PSI	PSI
10.	Perindo	Perindo
11.	PPP	PPP

Data Poldagri 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dalam Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai dan Surat Keputusan Bupati

Rote Ndao Nomor : 109/KEP/HK/2024 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Adminitrasi Partai Politik di Kabupaten Rote Tahun Anggaran 2024, sehingga persentase partai politik yang diverifikasi pada Tahun 2024 adalah 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

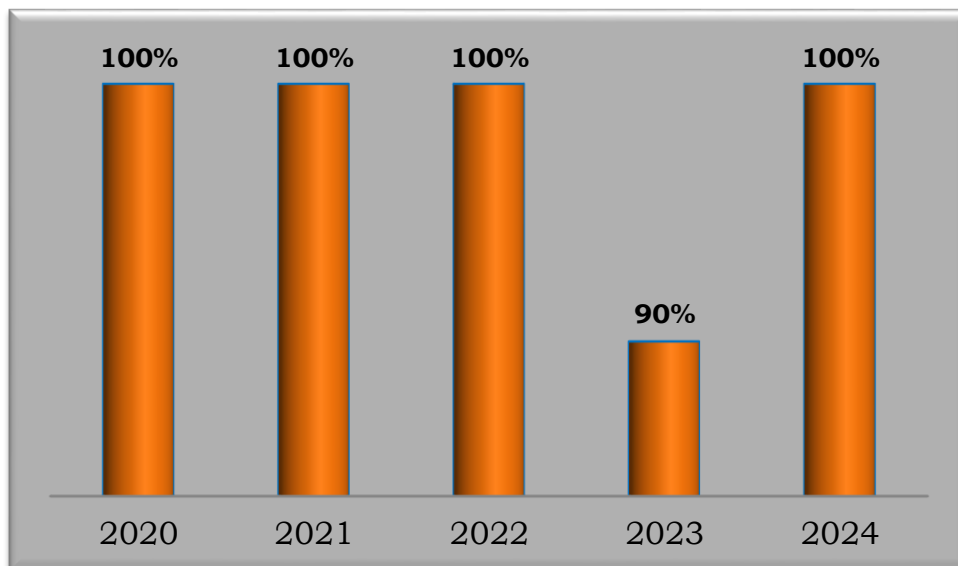
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Partai Politik yang diverifikasi mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Partai Politik yang diverifikasi ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Persentase Partai Politik yang diverifikasi pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 90%, menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 10 % dan capaian kinerja sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.7

Tren Persentase Partai Politik yang diverifikasi Tahun 2020-2024



Sumber: Olahan Data Partai Politik yang diverifikasi, 2024

Analisis Perbandingan Tren 5 (lima) Tahun terakhir

Tren realisasi indikator Persentase Partai Politik Yang di Verifikasi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni periode tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, pada tahun 2023 terjadi penurunan dan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup positif.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Persentase Partai Politik yang di verifikasi pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%. sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024.

4) Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Indikator Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi adalah Jumlah Kegiatan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi yang dilaksanakan dibandingkan dengan kegiatan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi yang direncanakan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah :

- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dalam rangka Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama Berdasarkan rujukan Peraturan bersama tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memberikan ruang bagi Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah social berbasis keagamaan untuk membantu pemerintah untuk menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, dengan menerbitkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 289/KEP/HK/2024.

Secara umum kegiatan fasilitasi FKUB Kabuapten Rote Ndao dalam Tahun Anggran 2024 dalam rapat koordinasi bersama FKUB sebanyak 3 (tiga) Frekwensi atau 100% dengan tujuan menyatukan dan gerak tindak serta sinkronisasi program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku fasilitator dan motivator dalam rangka memelihara perasatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama.

- **Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao melaksanakan membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 96/KEP/HK/2024, dengan tugas menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rote Ndao :

- 1) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rote Ndao;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rote Ndao.

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan baik dengan capaian 100%.

- **Pemantauan Aktivitas Orang Asing dan Ormas Asing**

Tujuan dalam pelaksanaan Pemantauan Aktifitas Orang Asing dan Ormas Asing adalah melakukan pemantauan keberadaan orang asing dan ormas asing serta cegah dini terhadap imigran gelap yang masuk ke wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya Kabupaten Rote Ndao, Pada kegiatan ini capaian 100%. Dari hasil pelaksanaan Pemantauan Aktifitas Orang Asing dan Ormas Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao bersama Badan Imigrasi Kelas I TPI Kupang, POLRI Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Pendataan WNA di Desa Boa, Nemberala, dan Oenggaut Kecamatan Rote Barat.

2. Memperoleh berbagai perspektif mengenai pentingnya Pengawasan Orang Asing di Kecamatan Rote Barat dari masing-masing instansi terkait.
3. Memperoleh informasi mengenai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing instansi terkait yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan proses masuk, keberadaan, dan kegiatan orang asing di Kecamatan Rote Barat dan Rote Barat Daya.
4. Memperoleh masukan dari masing-masing instansi mengenai titik rawan guna tindak lanjut dari Rapat Tim Pengawasan Orang Asing di Kecamatan Rote Barat yang akan dituangkan dalam kegiatan Operasi Gabungan.
5. Mengesahkan Tim Pengawasan Orang Asing Kecamatan Rote Barat sesuai Keputusan Kepala Badan Imigrasi Kelas I TPI Kupang.

Tabel 3.9
Data Orang Asing Tahun 2024

No	Asal Negara	Jumlah	No	Asal Negara	Jumlah	Status
1	Australia	154	16	Polandia	1	Turis
2	USA	25	17	Argentina	4	Turis
3	Perancis	30	18	Guatemala	4	Turis
4	Slovenia	2	19	Rusia	5	Turis
5	Brasil	2	20	Swiss	18	Turis
6	Uruguay	2	21	Jerman	4	Turis
7	Argentina	3	22	Austria	9	Turis
8	Italia	8	23	Jepang	4	Turis
9	Canada	2	24	Inggris	6	Turis
10	Denmark	8	25	Ukraina	4	Turis
11	Belanda	5	26	Selandia Baru	4	Turis
12	Korea	1	27	Portugal	2	Turis
13	Spain	10	28	Singapura	1	Turis
14	Finlandia	9	29	Denmark	3	Turis
15	Lithuania	1	30	Afrika Selatan	1	Turis
	Jumlah	262		Jumlah	70	332

Berdasarkan uraian penjelasan, maka disimpulkan bahwa capaian indikator Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 100%.

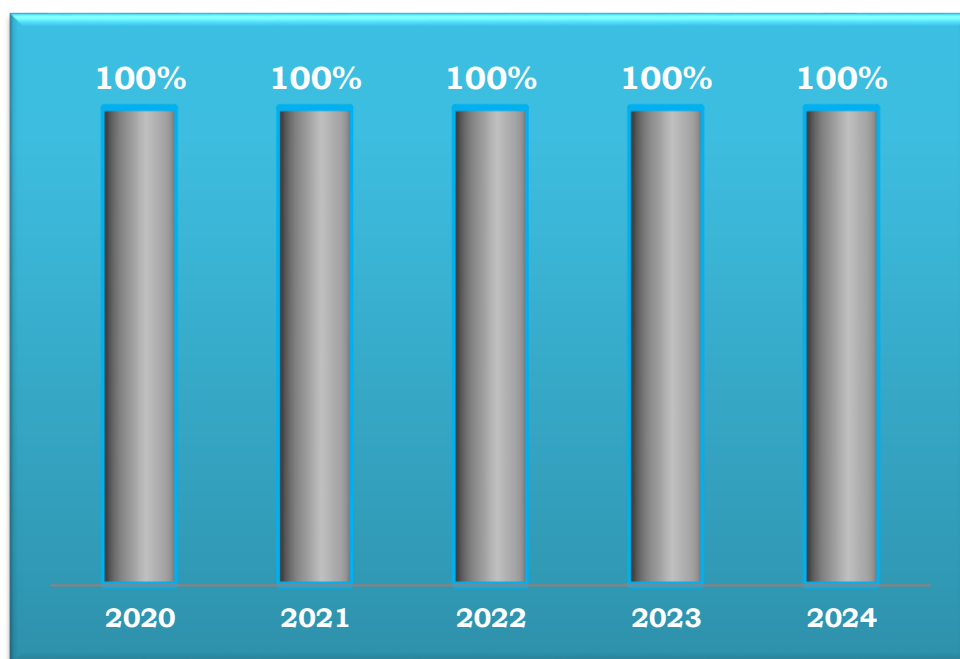
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capain Kinerja Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.8
Tren Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi Tahun 2020-2024



Sumber: Olahan Data Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, 2024.

Analisis Perbandingan Tren 5 (lima) Tahun terakhir

Tren Realisasi Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada tahun selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama yakni periode tahun 2020-2024. tidak mengalami penurunan atau peningkatan pencapaian setiap tahun.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Akhir Renstra

Realisasi Indikator Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100% maka menunjukkan telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian serta penjelasan diatas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Sasaran **Terwujudnya Pembinaan Partai Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini** tahun anggaran 2024 sebesar 100% sehingga capaian kinerja sasaran ini adalah **100%** atau dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Faktor Pendukung Keberhasilan Realisasi Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT yang telah memberikan kontribusi positif bagi terciptanya situasi kondusif dalam bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
2. Adanya dukungan dari OPD, instansi teknis, FKUB dalam rangka bersinergi untuk meningkatkan kondisi kepekaan, kesiap-siagaan danantisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya ancaman dan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat dan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

3. Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan aparat keamanan dan forum-forum (FKUB) instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik sosial, terorisme dan radikalisme;
 4. Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi kerja sama dan konsolidasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan narkoba serta pengamanan konflik sosial di Kabupaten Rote Ndao;
 5. Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.
- Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sector terkait dengan pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan, pembinaan ketahanan budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta koordinasi pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan politik;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini yang berbasis teknologi informasi;
4. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi forum-forum dibidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Belum adanya peraturan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Terbatasnya data dan informasi serta perencanaan program dan kegiatan yang belum optimal.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor terkait dengan pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan, pembinaan ketahanan budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta koordinasi pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan politik;
2. Peningkatan Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini yang berbasis teknologi informasi;
4. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi forum-forum dibidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Tersedianya peraturan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;dan
6. Tersedianya data dan informasi serta peningkatan perencanaan program dan kegiatan.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik sebesar Rp. 22.587.226.681,- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 22.576.524.007,- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah) atau sebesar 99,78 %. dan Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 341.810.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 321.566.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) atau sebesar 94,08 %.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Tingkat efisiensi capaian kinerja sasaran Terwujudnya pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini

Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100	99,45	0,55	Efisien	1,01	Efektif

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program capaian kinerja tujuan Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,55 % atau di kategorikan efisien, selain itu rasio capaian kinerja tujuan terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,01 sehingga dikategorikan efektif.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja operasi yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Keuangan Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao TA. 2024

No	Uraian			Pagu Anggaran	Realisasi	
				(Rp)	Jumlah	%
1.	BELANJA OPERASIONAL			25.529.255.781	25.387.639.722	99,45
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.500.251.100	1.443.104.907	96,19
	8.01.01	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.970.000	5.270.000	75,61
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.970.000	5.270.000	75,61
	8.01.01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.231.602.400	1.181.654.234	95,94
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.166.922.400	1.116.974.234	95,72
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		64.680.000	64.680.000	100,00
	8.01.01	KEGIATAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.800.000	4.800.000	100,00
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		4.800.000	4.800.000	100,00
	8.01.01	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		191.547.700	189.686.700	99,03
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.355.000	4.355.000	100,00
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		19.800.000	19.800.000	100,00
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22.418.700	22.418.700	100,00
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		144.974.000	143.113.000	98,72
	8.01.01	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.851.000	19.720.973	94,58
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.495.000	1.488.000	99,53
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		19.356.000	18.232.973	94,20
	8.01.01	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		44.480.000	41.973.000	94,36
	8.01.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		44.480.000	41.973.000	94,36

	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARKATER KEBANGSAAN		761.478.000	748.187.300	98,25	
	8.01.02.2.01	KEGIATAN perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		761.478.000	748.187.300	98,25	
	8.01.02.2.01.0004	SUB KEGIATAN pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi , wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan		761.478.000	748.187.300	98,25	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		22.887.226.681	22.836.441.515	99,78	
	8.01.03.2.01	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		22.887.226.681	22.836.441.515	99,78	
	8.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		22.587.226.681	22.576.524.007	99,95	

		8.01.03 .2.01.0 5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300.000.000	259.917.508	86,64	
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		13.270.000	13.120.000	98,87	
	8.01.04.2.01	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan		13.270.000	13.120.000	98,87	
		8.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	13.270.000	13.120.000	98,87	
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		25.220.000	25.220.000	100,00	
	8.01.05.2.01	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		25.220.000	25.220.000	100,00	
		8.01.05.2.01.004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.220.000	25.220.000	100,00	

	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		341.810.000	321.566.000	94,08	
		8.01.06.2.01.004	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	341.810.000	321.566.000	94,08	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.950.000	83.106.000	96,69	
			8.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring,	255.860.000	238.460.000	93,20
			TOTAL		25.529.255.781	25.387.639.722	99,45

Sumber : Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Hibah.

Alokasi anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao untuk pelaksanaan 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan. Alokasi anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 25.529.255.781,- (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 25.387.639.722 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 99,45 %.

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12

efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikator (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja	
						Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
							Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 : 8	11	12	13 = 4 / 9	14
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Politik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini	Terwujudnya pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	1. Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	100,00		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	341.810.000,00	321.566.000,00	94,08	20.244.000	5,92	Efisien	1,06	Efektif
		1. Cakupan Pembinaan Ideologi, wawasan Kebangsaan	100,00		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARKATER KEBANGSAAN	761.478.000,00	748.187.300,00	98,25	13.290.700	1,75	Efisien	1,02	Efektif
		2. Persentase Ormas/LSM yang dibina	100,00		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	13.270.000	13.120.000	98,87	150.000	1,13	Efisien	1,01	Efektif
		3. Persentase Partai Politik yang diverifikasi	100,00		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	22.887.226.681	22.836.441.515	99,78	50.785.166	0,22	Efisien	1,00	Efektif
		4. Cakupan Pembinaan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	100,00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	25.220.000	25.220.000	100,00	-	-	Efisien	1,00	Efektif
Kinerja Penunjang Lainnya			-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	1.500.251.100	1.443.104.907	96,19	57.146.193	3,81	Efisien		Kurang Efektif
Rata-Rata Capaian Kinerja			100,00	-	Total Anggaran	25.529.255.781	25.387.639.722	99,45	141.616.059	0,55	EFISIEN	1,01	Efektif
Rata- Rata Capaian Kinerja Tujuan			100,00	-		24.029.004.681	23.944.534.815	99,65	84.469.866	0,35	EFISIEN	1,00	Efektif

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp. 25.529.255.781,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.387.639.722 atau sebesar 99,45 %.

mencapai tingkat efisiensi kinerja 0,55 atau **efisien** dan **1,01** atau **efektif**

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Pencapaian kinerja Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 yaitu “*Presentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini*” sebesar 100 % dan Pencapaian Indikator Sasaran yaitu “*Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini*” sebesar 100 %, sehingga capaian sasaran kinerja tujuan/sasaran adalah 100 % atau dikategorikan *Sangat Tinggi*.

Pencapaian kinerja tahun 2024 senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba’a, 20 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Rote Ndao,



Marthen Muskanan, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19700217 200312 1 006

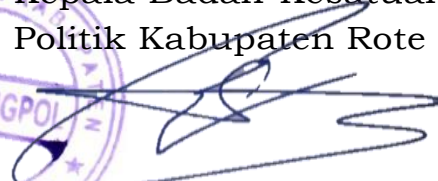
LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	REVIEW ER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	Kepala Badan	Update urutan indikator kinerja sesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2	Sekretaris	Data perangkat Daerah, sumber daya/sarana prasarana Badan di update (sesuai data aset) dan Pada Bab III lakukan penyesuaian sub bab di Daftar isi	
3	Kasubag Umpeg	Penyesuain pada Data nomonatif pegawai dan Penyesuaian kembali pada Tabel 3.2 terdapat indikator kinerja yang bukan merupakan indikator kinerja Badan Kesbangpol	

Ba'a, 30 Desember 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Rote Ndao,

Marthen Muskanan, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19700217 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai

Jalan Melkianus adoe

Website : www.rotendaokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 200/72/BAKESBANGPOL/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TA.2024

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-531-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Tahun 2023 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ndao Tahun 2024.

2. KETUA

Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

3. SEKRETARIS

- a. Mengkoordinasikan secara langsung Anggota dan Staf Sekretariat; dan
- b. Bertanggung jawab terhadap semua tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4. ANGGOTA

Menjalin koordinasi antar anggota Tim dan sekretaris serta menghimpun data dan mengolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 6 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Kabupaten Rote Ndao,



MARTHEN MUSKANAN, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19700217 200312 1 006

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
5. Tim Pelaksana masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 200/ 72 / BAKESBANGPOL/2024
TANGGAL : 6 Januari 2024
TENTANG : TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
ROTE NDAO TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
ROTE NDAO TAHUN 2024

NO .	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Marthen Muskanan, S.Sos	Penanggung Jawab
2.	Ir. Khristianus Penna	Ketua
3.	Dedy Fanggi	Sekretaris
4.	Maria M.Jemumut,A.Md	Anggota
5.	Burhanudin Mustafa	Anggota

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 6 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Kabupaten Rote Ndao,



MARTHEN MUSKANAN, S.Sos
Pembina Tk. I



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

	Nomor SOP – Ap	200/56/BAKESBANGPOL/2023
	Tanggal Pengesahan	20 Desember 2023
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Marthen Muskanan, S.Sos Pembina Tk. I Nip. 19700217 200312 1 006
	Nama SOP – AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dasar Hukum :		
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;	1. Pendidikan minimal SMA/SMK 2. Memahami Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja 3. Memahami Tata Naskah Dinas	
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;		
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;		
4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Plaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.		
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan	

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	1. Komputer 2. ATK 3. Jaringan Intrenet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja, Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
Penyusunan LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jl. Melkianus Adoe Telepon/Faximile (0380- Ba'a
Website : rotendaokab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

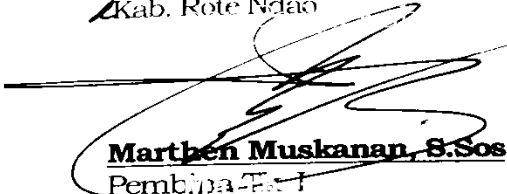
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEG I	INDIKATOR KINERJA	TAR GET KINE RJA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kinerja pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini		Persentase Layanan Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	
		Terwujudnya Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaa n Dini	Cakupan Pembinaan Ideologi wawasan kebangsaan	100 %
			Persentase Ormas/LSM yang dibina	100 %
			Persentase Partai Politik Yang Diverifikasi	100 %
			Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	100 %

Ba'a, 6 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Rote Ndao


Marthen Muskanan, S.Sos
Pembina Politik
NIP. 19700217 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marthen Muskanan, S.Sos

Jabatan : Kepala Badan

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Order Maks Sombu, SH, MA, MH

Jabatan : Penjabat Bupati Rote Ndao

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 11 Desember 2024

PIHAK KEDUA

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

ORDER MAKS SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO,

MARTHEN MUSKANAN, S.Sos

NIP. 19700217 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas kinerja pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini		Persentase layanan pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	%	100
		Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini	Cakupan Pembinaan Ideologi wawasan kebangsaan	%	100
			Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	100
			Persentase Partai Politik Yang Diverifikasi	%	100
			Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	%	100
No	Program		Anggaran	Sumber Dana	
1.	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		Rp. 761.270.000	DAU	
2.	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan		Rp. 22.587.226.681	DAU	
3.	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Rp. 13.270.000	DAU	
4.	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		Rp. 25.220.000	DAU	
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Rp. 341.810.000	DAU	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Rp. 1.500.251.100	DAU	
	JUMLAH		Rp. 25.529.255.781	DAU	

Ba'a, 11 Desember 2024

PIHAK KEDUA

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,



ORDER MAKS SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO,



MARTHEN MUSKANAN, S.Sos
NIP. 19700217 200312 1 006

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kierja	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Per-Triwulan			
								I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas kinerja pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini		Persentase Layanan Pembinaan Politik, 1.1 Kesatuan Bangsa dan Kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 274.440.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√
		Terwujudnya Pembinaan politik, Kesatuan Bangsa dan Kewsapadaan Dini	1.2 Cakupan Pembinaan Ideologi wawasan kebangsaan	100 %	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 676.501.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	
			1.3 Persentase Ormas/LSM yang dibina	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 13.270.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√			
			1.4 Persentase Partai Politik Yang Diverifikasi	100 %	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Rp 19.970.086.200	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	
			1.5 Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 25.220.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√			

Ba'a, 6 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao



A handwritten signature in purple ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be "Marthen Muskanan".

Marthen Muskanan, S.Sos

Pembina Tk. I
NIP.197012172003121006

Penanggung jawab
13
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama, Ormas
Bidang Poldagri
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama, Ormas

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024

INSTANSI	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO
TUGAS POKOK	:	Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
FUNGSI	:	a. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Kebangsaan dan Politik b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kebangsaan dan Politik c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kebangsaan dan Politik d. Pelaksanaan administrasi Bidang Kebangsaan dan Politik e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
ISU STRATEGIS	:	1 Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 2 Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 3 Pembinaan Ketahanan Budaya ,Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi 4 Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kualitas Kinerja pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	Persentase layanan pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	%	Jumlah kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang direncanakan x 100	Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Rote Ndao	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik
	Terwujudnya pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	Cakupan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan	%	Jumlah kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan yang direncanakan x 100		Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	Jumlah ormas atau LSM yang dibina / Total ormas atau LSM x 100		Bidang Ketahanan ekonomi, sosbud, agama dan Ormas
		Persentase partai politik yang diverifikasi	%	Jumlah partai politik yang diverifikasi / Jumlah seluruh partai politik x 100		Bidang Politik Dalam Negeri
		Cakupan pembinaan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	%	Jumlah kegiatan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang direncanakan x 100		Bidang Ketahanan ekonomi, sosbud, agama dan Ormas

Ba'a, 15 Mei 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao



Marthen Muskanan, S.Sos
Pembina Tk. I
Nip. 19700217 200312 1 006